

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Jalan Tol

1. Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita melihatnya dan waktu yang dituju. Pembangunan dilakukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi. Pembangunan tersebut bisa berupa sarana dan prasarana seperti jembatan, jalan, pembangunan ibadah dan sarana transportasi. Pembangunan itu sendiri selalu berkaitan erat dengan bidang ekonomi. Dalam sudut pandang sosiologi, menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Menurut Soerjono Soekanto “proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material”.¹ Dalam sudut pandang ekonomi pembangunan sendiri berkaitan dengan ekonomi. Atau lebih ditunjukkan kepada pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Meier dalam Marzali dari sudut pandang ekonomi mengemukakan “pembangunan berarti suatu proses dimana *real per capita income* dari suatu Negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan jumlah penduduk yang dibawah garis

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), 360.

kemiskinan, tidak bertambah, dan distribusi pendapatan tidak makin senjang”.²

Pengertian pembangunan menurut para ahli sebagaimana yang dikutip oleh Redatin Parwadi adalah sebagai berikut:

a. Pendapat dari Rogers dan Schoemaker

Pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial, dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk mendapatkan pendapatan per-kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial.

b. Pendapat Kleinjans

Pembangunan pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP (*Gross National Product*), tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri.

c. Pendapat Rogers

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan, dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas melalui kontrol yang lebih besar

² Amri Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 62.

yang meraka peroleh terhadap lingkungan mereka.

d. Pendapat Todaro

Todaro menyatakan bahwa pembangunan secara tradisional mengandung pengertian kapasitas perekonomian nasional, yang kondisi perekonomian awalnya kurang lebih berada dalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama, untuk menghasilkan dan mempertahankan tingkat kenaikan produk nasional kotor (PNK) sekitar 5%-7% setahun. Selanjutnya todaro menekankan pentingnya pembangunan pada Negara-negara berkembang karena kondisinya sangat memprihatinkan, terutama kemiskinan dan ketidakberdayaan. Todaro juga mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

e. Menurut Haryono

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu.³

³ Redatin Parwadi, *Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Untan Press, 2013), 37-39.

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh dan dari sudut pandang yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah kegiatan perubahan yang direncanakan, untuk meningkatkan taraf hidup manusia baik dalam segi sosial maupun ekonomi.

2. Konsep-konsep Pembangunan

Konsep pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Beberapa konsep-konsep pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Konsep Pembangunan yang Berorientasi pada Pertumbuhan (Pertumbuhan Ekonomi)

Konsep pembangunan dengan sudut pandang ekonomi dimulai pada abad ke 18. Konsep pembangunan ini dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith dalam Ginandjar Kartasasmita adalah proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*).

Konsep pembangunan ini yang mengutamakan bidang ekonomi tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, karena dalam “tiga dasawarsa (1940-1970) menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat dilapiskan bahwa tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan yang seperti diharapkan itu”.⁴

⁴ Ginandjar Kartasasmita, *Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat* (Surabaya: t.p., 1997), 5.

b. Konsep Pembangunan Kebutuhan Dasar/Kesejahteraan (Kebutuhan Dasar)

Konsep kebutuhan dasar manusia atau *basic human needs* ini lahir dan berkembang sekitar tahun 1981. Strategi dari konsep ini adalah dengan menyediakan *publicservice* dan juga jaminan bagi masyarakat miskin agar dapat menikmati layanan tersebut. Konsep ini berpandangan perlu adanya pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Negara atau bangsa dan tidak hanya memperhatikan tujuan sosial ekonomi.

c. Konsep Pembangunan yang Berpusat pada Manusia

Konsep yang terakhir adalah konsep pembangunan manusia. Tujuan utama dari konsep ini adalah “menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang.”⁵ Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tak dapat muncul begitu saja, dan pertumbuhan produksi serta pendapatan menurut pandangan ini adalah hanya sebuah alat yang menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya dari pembangunan, tentu pembangunan manusianya sendiri.

⁵ Ginandjar Kartasmita, *Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat* (Surabaya: t.p., 1997), 8.

Jadi dalam konsep pembangunan selama ini terdiri dari tiga pandangan yaitu pandangan pembangunan dari pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar dan pembangunan yang berpusat pada manusia.

3. Tujuan Pembangunan

Menurut Todaro ada tiga tujuan pembangunan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang dan Negara-negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.⁶

4. Dampak Positif dan Negatif

Kegiatan pembangunan memiliki dampak positif dan negatif.

Dampak berkelanjutan menurut Emil Salim, yaitu:

⁶ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 27

a. Dampak positif dari pembangunan yaitu:

1) Meningkatkan kualitas hidup

Menurut Nofitri WHO “kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem di mana mereka tinggal serta hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, hal-hal lain yang menjadi perhatian individu”.⁷ Dengan adanya pembangunan maka kualitas yang dimiliki mereka dapat lebih meningkat karena adanya pembangunan. Contohnya ketika masyarakat yang ada di pedesaan dahulu sulit untuk pergi ke kota tetapi setelah adanya pembangunan seperti jalan tol atau jalan raya maka masyarakat di pedesaan dapat pergi ke kota dengan lebih mudah.

2) Turunnya angka kematian

Menurut badan pusat statistik, kematian adalah “keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup”.⁸ Jadi dengan adanya pembangunan, dampak positif yang dirasakan adalah menurunnya angka kematian karena sarana dan prasarana dari adanya pembangunan. Seperti pembangunan rumah sakit dan pembangunan tempat pembuangan sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih.

⁷ Nofitri, *Gambaran Kualitas Hidup Penduduk Dewasa pada Lima Wilayah Jakarta*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), 11.

⁸ http://daps.go.id/file_artikel/70/MORTALITAS.pdf 17 Oktober 2018.

3) Meningkatkan kesejahteraan

Menurut Astriana Widyastuti pengertian kesejahteraan adalah “kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur dalam keadaan sehat, dan damai sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya”.⁹ Seperti halnya meningkatkan kualitas hidup, maka dampak positif dari adanya pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan yang dirasakan oleh manusia karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia.

b. Dampak negatif dari pembangunan yaitu:

1) Berkurangnya sumber daya

Sumber daya yang berkurang dimaksud adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung atau terdapat di alam. Dampak dari adanya pembangunan diantaranya adalah sumber daya berkurang karena dalam setiap pembangunan pasti akan ada daerah yang digusur atau terbongkar. Seperti penebangan hutan untuk pembangunan jalan.

2) Pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya limbah hasil kegiatan manusia kedalam suatu wilayah tertentu sehingga kualitas lingkungan wilayah tersebut menjadi berubah tidak

⁹ Sugiharsono, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VIII Edisi 4* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 39.

sesuai lagi dengan peruntukannya. Dengan adanya pembangunan bisa terjadi pencemaran lingkungan dari hasil pembangunan yang dilakukan. Seperti contoh pembangunan jalan yang dapat mengakibatkan polusi udara karena debu dari hasil perataan jalan dan polusi suara karena kersanya suara mesin dalam membuat jalan yang membuat masyarakat sekitarnya terganggu.¹⁰

5. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Peran Pemerintah dalam pembangunan menurut Siagian aparatur pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran aparatur pemerintah yang diantaranya adalah sebagai stabilisator, katalisator, modernisator, kepeloporan dan orientasi kerja. Kegiatan pembangunan tertentu. Untuk lebih rinci penjelasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah stabilitas mutlak perlu terpelihara dalam kehidupan suatu Negara bangsa. Tanpa adanya stabilitas, keamanan, ketertiban, kerukunan akan terganggu. Bahkan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat akan tidak berhasil.
- b. Katalisator, aparatur pemerintah harus mampu berperan memperlancar terjadinya perubahan yang akan membawa dampak positif di samping secara dini mampu mendeteksi perubahan yang

¹⁰ Sugiharsono, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VIII Edisi 4* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 39.

akan berdampak negatif serta akan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.

- c. Mordenisator, melalui pembangunan, setiap Negara ingin menjadi Negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh Negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki niat tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Kepeloporan, selaku pelopor aparatur pemerintah dapat memainkan peranan penting dalam memperkenalkan dan membantu masyarakat menerapkan cara-cara kerja baru tersebut, misalnya melalui penyuluhan, penerangan, percontohan dan lain sebagainya. Aparatur pemerintah akan mampu memainkan peranan tersebut apabila dikalangan mereka sendiri terdapat jiwa kepeloporan.
- e. Orientasi kerja, apapun yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, kesemuanya harus dikaitkan dengan dan diarahkan kepada tercapainya tujuan Negara yang bersangkutan. Telah umum diketahui bahwa tujuan akhir suatu Negara jangkauan waktunya jauh kedepan dan sifatnya pun relatif tidak terbatas. Pada hal

sarana dan prasarana, tenaga dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut selalu terbatas, oleh karena itu orientasi kerja yang tepat dianut oleh aparatur pemerintah adalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja.¹¹

Peran pemerintah Indonesia dalam pembangunan pun tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pada pasal 1 ayat 2 “Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.¹² Selanjutnya tahun 2007 pemerintah mengeluarkan kelanjutan dari program pembangunan nasional tersebut yang tertulis pada UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

“RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

¹¹ Sondang P Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2001), 135-142.

¹² Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2 Tersedia dari situs <http://bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2004-tentang-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-sppn/> diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 07.15 WIB.

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan Visi, Misi dan Program Presiden”.¹³

Jadi kesimpulan dari Undang-Undang tersebut menurut saya adalah bahwa rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut merupakan kelanjutan atau sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pengertian Jalan Tol

Jalan tol atau yang bisa disebut juga dengan jalan bebas hambatan merupakan salah satu cara pemerintah untuk agar dapat mewujudkan pembangunan secara merata dan sebagai salah satu cara agar mempercepat pelayanan pengiriman jasa distribusi dan para pengguna jalan tol pun harus membayar sejumlah uang agar bisa menggunakan jalan tersebut. Adapun pengertian jalan tol berdasarkan pada PP No. 15 Tahun 2005 tentang jalan, “jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol”.¹⁴ Pengertian Tol menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pembangunan jalan tol.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Tersedia dari situs <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2015/02/uu-no-17-th-2007.pdf> diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 07.30 WIB

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jalan Tol*, UU No. 15 Tahun 2005, LN No. 32 Tahun 2005, TLN No. 4489, Ps. 1, ayat 2.

7. Manfaat dan Tujuan Pembangunan Jalan Tol

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar, penyelenggaraan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Berdasarkan Undang-undang No. 38/2004 tentang Jalan, dinyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.¹⁵

Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional dan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta. Pemerintah melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan umum dengan menggunakan dana yang berasal dari pemerintah atau badan usaha.

Investasi dengan pembangunan jalan tol baru akan menyediakan transportasi yang lebih efisien dan memacu investasi sektor lain yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun tujuan dan manfaat strategis pembangunan jalan tol diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 45 ayat (1 dan 2)

- a. Pembukaan lapangan kerja dalam skala besar.
- b. Peningkatan penggunaan sumber daya dalam negeri.
- c. Mendorong kembalinya fungsi intermediasi perbankan ke sektor investasi produktif demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- d. Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui jalan tol sebagai pendorong meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memperlancar ekspor.
- e. Memacu kebangkitan sektor riil dengan menciptakan efek *multiplier* bagi perekonomian nasional.¹⁶

Berdasarkan penjelasan peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan tol memiliki tujuan agar terciptanya pemerataan pembangunan dan dapat meningkatkan pertumbuhan bisa dalam bidang ekonomi maupun sosial.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan aspek penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas

¹⁶ Syafatun, *Investasi Dengan Pembangunan Jalan Tol Baru Akan Menyediakan Transportasi yang lebih Efisien dan Memacu Investasi sektor Lain yang Akan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan ITB, 2009), 29.

perekonomian.¹⁷ Kesejahteraan dalam literatur konvensional yakni tujuan dari manusia dalam memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan.¹⁸

Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang diukur bukan secara ekonomi dan fisik, namun juga memperhatikan aspek sosial, mental, serta dari segi spiritual.¹⁹ Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang.²⁰

Kesejahteraan di Indonesia diartikan hidup aman dan bahagia, karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi, seperti makanan yang cukup, gizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan yang layak dan perlindungan. Selain itu, masyarakat dapat dikatakan sejahtera secara ekonomi bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan setiap hari
- b. Mampu membeli barang-barang pemuas kebutuhan
- c. Dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung
- d. Mempunyai tempat tinggal yang layak
- e. Adanya peningkatan pendapatan

Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal.

¹⁷ <http://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/>, diakses pada tanggal 19 juni 2018

¹⁸ Ahmad Syakur, *Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 38.

¹⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 44.

²⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 54.

Konsep kesejahteraan Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

2. Unsur-unsur Dan Komponen Kesejahteraan

Pada awalnya kesejahteraan sosial di definisikan sebagai keadaan sejahtera secara sosial yang terdiri dari tiga unsur sebagai berikut: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan. Kesejahteraan yang diinginkan oleh umat Islam dapat terwujud melalui unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Anggota keluarga menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dengan artian bahwa ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu semuanya berkualitas.

²¹ M. Qurais Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan bermasyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 292.

- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dengan cara tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani. Kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kehidupan rumah tangga, kesehatan serta pendidikan untuk seluruh keluarga.

Ada enam komponen yang mencakup dalam kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Perumahan
- d. Pelayanan Kerja
- e. Pemeliharaan pendapatan yang meliputi asuransi sosial dan bantuan sosial
- f. Pelayanan sosial personal.

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang harus didapatkan setiap manusia. Kesejahteraan tidak hanya harus dapat dirasakan oleh golongan orang kaya saja, akan tetapi juga harus dirasakan oleh golongan orang miskin juga. Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah harus memandang struktur masyarakat tertentu saja, akan tetapi harus menyeluruh terhadap setiap masyarakat. Siapapun itu dan dari golongan manapun harus merasakan kesejahteraan.

Maka dari itu aspek-aspek kesejahteraan ekonomi yang akan dibangun harus mencakup: ketahanan pangan, kesehatan, sandang, pendidikan dan perumahan. Urutan tersebut diperkirakan merupakan

urutan kepekaan masyarakat terhadap krisis. Artinya, jika krisis melanda maka yang akan dikorbankan untuk pertama kali adalah pendidikan, dan jika sampai pada pangan maka hal tersebut merupakan suatu hal yang amat serius.

3. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materi saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material, seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Indikator kesejahteraan dalam islam merujuk pada Al-Qur'an, yakni:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
(۴)

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy [105]: 3-4).²²

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam

Al-Qur'an ada tiga, yaitu:

Pertama, menyembah tuhan (*ibadatullah*). Indikator ini mengandung makna bahwa proses kesejahteraan masyarakat harus didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik terlebih dahulu dan yang paling utama adalah benar-benar menjadi Allah

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 305.

sebagai pelindung, pengayom, dan penolong. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.²³

Dalam ajaran islam prinsip tauhid merupakan hal yang paling asasi dan esensial, ia tidak boleh terlepas dalam keyakinan setiap muslim yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, kecuali Allah semata dan Muhammad utusan-Nya.²⁴

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (QS. Al-Ikhlâs [110]: 1-4).²⁵

Kedua, menghilangkan lapar atau pertumbuhan ekonomi, berdasarkan indikator ini hidup sejahtera adalah hidup dalam kondisi dimana terpenuhinya semua kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.²⁶

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy [105]: 4).²⁷

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada umat manusia bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu saja. Akan tetapi rezeki tersebut harus didistribusikan kepada semua umat agar mereka tidak kelaparan dan tidak terkungkung dalam kesengsaraan.

²³ M. Ulinnuha Khusnan, *Islam dan Kesejahteraan: Memotret Indonesia, Dialog*, 66 (Desember, 2008), 43-44.

²⁴ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 42.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 306.

²⁶ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 46.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 305.

Kata *minju'* (rasa lapar) dalam ayat tersebut juga menunjukkan makna *disebabkan karena* yakni Allah SWT, yang telah menganugerahkan kepada umat manusia berupa nikmat dan memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar melalui perdagangan. Sehingga yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah ketersediannya bahan makanan bagi setiap keluarga.²⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah [63]: 10).²⁹

Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa bekerja dan memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan di langit maupun di bumi, sebagai bekal dalam menjaga eksistensi dirinya dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

Ketiga, menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera berarti hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tenang. Jika tindak kriminal seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus-kasus lainnya masih terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat, maka komunitas tersebut belum bisa disebut sejahtera. Dengan demikian, pembentukan pribadi yang saleh dan pembuatan sistem yang mampu menjaga kesalehan setiap orang merupakan hasil integral dari proses kesejahteraan masyarakat. Inilah tiga indikator yang digariskan Islam (Al-Qur’an), hidup sejahtera dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 539.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 279.

yang kuat, tercukupinya semua kebutuhan dasar, dan jika semua itu dapat terpenuhi, maka akan tercipta suasana aman, nyaman dan tentram.³⁰

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.³¹

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari

³⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 279.

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

a. Muhammad Abdul Manan

Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³²

b. M. Umer Chapra

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³³

c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat Muslim moderen.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan

³² Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3.

³³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

³⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28.

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.³⁵ Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁶

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni: *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.³⁷

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai *Tauhid*

³⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20-22.

³⁶ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 29.

³⁷ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III T, 2002), 17.

(keEsaan Tuhan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam:

a. *Tauhid*

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.³⁸

b. *'Adl*

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap

³⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 14-15.

mahluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.³⁹

³⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 16.

c. *Nubuwwah*

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Sidiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran) dan *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas).

d. *Khalifah*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia

sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.⁴⁰

e. *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: "Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 20-21.

peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja di pihak lain atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa, sehingga tercipta keseimbangan.⁴¹

3. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

⁴¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 23-24.